

Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

Ingin Program JKN-KIS Lebih Berkualitas, Dirut Paparkan Prospek dan Tantangan ke Depan

Jakarta (05/03/2021) – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memaparkan prospek dan tantangan pengelolaan program ke depan pada kuliah umum yang dilaksanakan oleh Prodi Magister Ilmu Kedokteran Klinis FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Jumat (05/03). Menurutnya, tahun ke-7 Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), program ini juga telah memberikan banyak pembelajaran bagi pengelolaan jaminan sosial di Indonesia.

“Program JKN-KIS berkontribusi pada berbagai sektor di Indonesia seperti pencegahan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan usia harapan hidup. Angka tersebut diharapkan terus meningkat, sehingga cita-cita dari penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dapat terwujud,” kata Ghufron.

Selain itu, kehadiran Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjadi pembelajaran negara lain dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Selain aktif dalam organisasi jaminan sosial tingkat dunia, berbagai negara juga sering melakukan penelitian, kerjasama strategis, dan tujuan pembelajaran negara-negara seperti Bangladesh, Turki, Kamboja, India, dan Aljazair yang hendak menerapkan sistem jaminan sosial.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga menjadi tambang data jaminan kesehatan lewat ekosistem digital yang dibangun dan terus disempurnakan. Lebih jauh data yang dihasilkan dari ekosistem digital ini dimanfaatkan untuk kebutuhan studi maupun perumusan kebijakan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah, dengan diluncurkan ‘Data Sampel’ dan ‘Dashboard JKN’.

Namun Ghufron juga mencermati, berbagai tantangan yang harus ditindaklanjuti bersama. Diantaranya, pentingnya memastikan keseimbangan antara manfaat dan iuran JKN. Pada awal implementasi Program JKN, terjadi ketidakseimbangan antara manfaat JKN yang komprehensif dengan besaran iuran yang ditetapkan.

“Ketidakseimbangan tersebut akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Jika terdapat keseimbangan maka akan mudah memastikan kuantitas dan kualitas dari layanan di fasilitas kesehatan,” kata Ghufron.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya peta jalan integrasi sistem dan basis data antar instansi pemangku kepentingan Program JKN. Hal tersebut diharapkan akan mempercepat cakupan kepesertaan Program JKN-KIS dan efektifitas sumber daya untuk mengoptimalkan proses pendaftaran, pengumpulan iuran, dan penjaminan pelayanan kesehatan.

“Peran instansi terkait termasuk Pemerintah Daerah yang terintegrasi serta sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini juga sesuai dengan yang diharapkan oleh WHO, bahwa setiap manusia harus memiliki akses terhadap jaminan kesehatan atau universal health coverage, dimana setiap individu, kapanpun, dimanapun, memiliki akses jaminan kesehatan tanpa kesulitan finansial,” kata Ghufron.

Ghufron juga menyoroti perlunya reshaping manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap JKN. Selain itu, perlunya pentahapan dalam perubahan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Hal ini harus diantisipasi khususnya oleh fasilitas kesehatan.

“Terlebih adanya perubahan epidemiologi pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengubah sendi kehidupan termasuk pola penyakit dan pola pengobatan. Ini juga harus diantisipasi BPJS Kesehatan dan bagi seluruh pemangku kepentingan JKN. Bisa saja, kunjungan pelayanan kesehatan akan kembali meningkat pasca pandemi sehingga biaya pelayanan kesehatan akan kembali tinggi, untuk itu perlu diperkuat langkah-langkah promotif dan preventif,” kata Ghufron.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Care Center : 1 500400

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

PRESS RELEASE

Wanting to Improve JKN-KIS Program Quality, the President Director Describes Future Prospects and Challenges

Jakarta (05/03/2021) - President Director of BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, explained the prospects and challenges of future program management in a public lecture held by the Master Program in Clinical Medicine FK-KMK Gadjah Mada University, Friday (05/03). According to him, in the 7th year of the National Health Insurance Program-Healthy Indonesia Card (JKN-KIS), this program has provided many lessons for the management of social security in Indonesia.

"JKN-KIS program contributes to various sectors in Indonesia such as poverty prevention, economic growth, and increasing life expectancy. This figure is expected to continue to increase, so the goal of implementing social security in Indonesia can be realized," said Ghufron.

In addition, the presence of the JKN-KIS Program from BPJS Kesehatan, is a lesson for other countries in the implementation of the health insurance program. Apart from being active in world-class social security organizations, various countries also often carry out research, strategic cooperation, and learning objectives for countries such as Bangladesh, Turkey, Cambodia, India, and Algeria that want to implement a social security system.

Furthermore, BPJS Kesehatan is also a data mine for health insurance through a digital ecosystem that is built and continues to be improved. Furthermore, the data generated from this digital ecosystem is used for the needs of studies and policy formulation to regional governments level, with the launch of "Sample Data" and "Dashboard JKN".

However, Ghufron also noted the various challenges that must be followed up. Among them, the importance of ensuring a balance between JKN benefits and contributions. At the beginning of the implementation of JKN Program, there was an imbalance between the comprehensive JKN benefits and the stipulated contribution rates.

"This imbalance will have an impact on the quality of health services provided to JKN-KIS participants. If there is a balance, it will be easy to ensure the quantity and quality of services in health facilities," said Ghufron.

Another challenge that needs attention is the need for a road map for system integration and database among stakeholders of the JKN Program. It is hoped that this will accelerate the coverage of JKN-KIS Program membership and the effectiveness of resources to optimize the registration process, collection of contributions, and health services guarantee.

"The roles of related agencies, including regional governments, are integrated and in accordance with the targets. This is also in accordance with what WHO hopes, that every human being must have access to universal health coverage, where every individual, anytime, anywhere, has access to health insurance without financial difficulties," said Ghufron.

Ghufron also highlighted the need for reshaping the benefits of JKN based on basic health needs and JKN inpatient classes. In addition, there is a need for phasing in changes to the payment system for health facilities. This must be anticipated in particular by health facilities.

"Moreover, there are changes in the epidemiology after the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic changes the joints of life, including disease patterns and treatment patterns. This must also be anticipated by BPJS Kesehatan and for all JKN stakeholders. It could be that visits to health services

will increase again after the pandemic so that the cost of health services will return to a high level. Therefore, promotional and preventive measures need to be strengthened," said Ghufron.